



RENJA

**RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 telah tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja ini disusun dengan berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong guna mewujudkan visi dan misi Badan secara proporsional sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi.

Rencana kerja yang disusun dimaksudkan sebagai rencana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Lebong. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.

Kami menyadari, bahwa Rencana Kerja ini tidak luput dari berbagai kekurangan, baik susunan maupun substansinya. Oleh karenanya kritik dan saran guna penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini dengan segala kerendahan hati kami sampaikan ucapan terima kasih, semoga Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal.

Suka Marga, Maret 2020

Kepala



BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si

Pembina Utama/Muda NIP. 19730910 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Susunan Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.....	3
1.3 Landasan Hukum.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II ^{HASIL} EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian Renstra.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

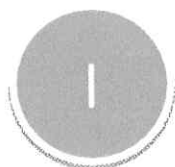
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	28

BAB IV ^{Rencana Kerja dan Pendanaan} PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	33
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Aparatur OPD.....	6
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	35
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 Konversi Permendagri 90 Tahun 2019.....	40
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 Pemutakhiran Konversi Permendagri 90 Tahun 2019.....	58



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders, guna optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diimplementasikan melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, penganggaran dan sumber daya yang diperlukan.

Sebagai suatu dokumen resmi Rencana daerah, Renja SKPD yang sekarang berganti Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Substansi Renja OPD memuat kebijakan program kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat. Dimana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Selanjutnya, Renja OPD ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menerjemahkannya secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong beserta indikator pencapaiannya. Dalam menyusun Renja ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong telah berusaha melibatkan para pemangku kepentingan sehingga menciptakan rasa keterlibatan dan memiliki terhadap dokumen perencanaan OPD. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain RPJMD Kabupaten Lebong dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong.

Dalam kerangka inilah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun perencanaan kinerja tahun 2021 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2016-2021.

1.2 Susunan Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan II;
 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
 3. Seksi Pelaporan Layanan.

- g. Unit Pelaksanaan Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya telah diinventarisir pada Kartu Inventaris Barang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang terdiri dari :

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
4. Kendaraan dinas
5. Gedung dan bangunan
6. Aset tetap lainnya.

Sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan latar pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PEN- DI- DIKAN
1	2	3	4	5
1	BAMBANG ASB, S.Sos.M.Si NIP.19730910 199903 1 002	Pembina Utama Muda /IVc	Kepala	S2
2	SUDIRWAN, S.Sos NIP. 19640114 198603 1 008	Pembina IV/a	Sekretaris	S1
3	FREDY SUDARTA, S. Hut NIP. 19790630 200604 1 015	Penata Tk. I/III.d	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	S1
4	DEDEN KUSDINAR, ST NIP. 19740417 200804 2 001	Penata TK I/III.d	Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	S1
5	SAPUTRA, SH NIP. 19680710 200502 1 001	Pembina IV/a	Kabid PPIPM	S1
6	YESI ETRILITA, S.Sos NIP.19761219 201001 2 006	Penata TK I/III.d	Kabid P3MSI	S1
7	NURLELAWATI, S.Sos NIP. 19641020 198902 2 002	Penata TK. I/III.d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1
8	OYON SOFIANSORI, SE NIP. 19790703 200604 1 007	Penata TK I/III.d	Kasi Perencanaan PM	S1
9	KURNIADI, SE NIP.19720815 200701 1 036	Penata/IIIc	Kasi PP & Non P II	S1
10	HENNY WAHYUNI, SH NIP. 19820606 200804 2 002	Penata TK. I/III.d	Kasi Kebijakan & AL	S1
11	LESI YULIANI, SE NIP. 19790113 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi PIPM	S1
12	RAINA HARIYANI, SE NIP. 19780621 200903 2 005	Penata /IIIc	Kasi Pembinaan Pelaksanaan PM	S1
13	FENI SASWITA, S.Akt.,M.Si NIP. 19810221 200903 2 005	Penata/IIIc	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2
14	HERLENI,S.Sos NIP.19831223 200212 2 002	Penata/IIIc	Kasi Promosi PM	S1
15	EFNI WULANDARI,SE NIP. 19841101 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi PP & Non P I	S1
16	YIYIN SUHIDAYA, SKM NIP. 19850425 200903 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan	S1
17	EVI SULASTRI, SE NIP. 19870413 200604 2 003	Penata Muda TK. I/IIIb	Kasi Pengolahan Data & Informasi	S1

18	ROSITA NIP. 19750725 200804 2 001	Penata TK. I/III.d	Kasi Perizinan dan Non Perizinan II	S1
19	DERY GUSTIAN, ST NIP. 19810805 200903 1 004	Penata TK. I/III.d	Kasi Sumber Daya Mineral	S1
20	GUNDALA, SE NIP. 19850328 200604 1 005	Penata/IIIc	Kasi Pelaporan Layanan	S1
21	RONALDI, S.Pd NIP. 19720126 2014 07 1 003	III.b	Staf	S1
22	MEILI YANTI NIP. 19840514 200701 2 004	Pengatur Tk. I /IId	Staf	SMK
23	FERRY AMANDIKA	Pengatur Muda TK I/Iib	Bend. Pengeluaran	SMA

Sumber Data : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Februari 2020.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Aparatur OPD

No	Uraian	Jumlah Pegawai			Pendidikan					
		Gol IV	Gol III	Gol II	SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2
1	PNS	2	15	2	-	-	2	-	15	2
2	Non PNS	-	-	-	-	-	12	1	6	-

Sumber Data : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Februari 2020.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48170);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 180, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
18. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016)
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016)
27. Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Susunan Organisasi dan Sumber Daya Aparatur
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dan Capaian Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian Renstra

Dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021, memiliki 13 Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan.

Dalam Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 8 (Sembilan) Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2019 telah disusun berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Adapun dana yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong sampai dengan anggaran perubahan (APBDP) tahun 2019 sebesar **Rp. 4.221.340.000,00**, dan terealisasi sebesar **Rp. 3.665.991.054,00,-** atau **86,84%**.

Dalam tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu merencanakan usulan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan dengan 42 (Empat Puluh Dua) sub kegiatan untuk mendukung 6 (Enam) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-

- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 358.000.000,-
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 430.000.000,-
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
- g. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-
- j. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-
- l. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 0,-
- m. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 0,-
- n. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
- o. Pengadaan meubeleurnya dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- p. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
- q. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

- r. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 0,-

Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan:

- a. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 0,-
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 0,-
- c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
- d. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,-
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,-

- b. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-
- b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 260.000.000,-

4. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan : Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Sub Kegiatan:

- a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,-

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,-
- b. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-

- c. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
- d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi / insentif daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-

6. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-

Total kebutuhan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 5.316.000.000,-** (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Secara umum analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh.

Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan alokasi dana setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 4.221.340.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.665.991.054,00,- atau 86,84 %.

Adapun uraian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019, sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 117.800.000,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 194.000.000,-
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 249.550.000,-
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 12.000.000,-
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 12.000.000,-
7. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 94.360.000,-
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 55.000.000,-
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,-
10. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 85.000.000,-

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 278.712.500,-
12. Pembangunan Gedung Kantor
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.931.248.000,-
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 163.752.500,-
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 121.050.000,-
15. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 149.112.000,-
16. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 51.625.000,-
17. Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 17.500.000,-
18. Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 4.998.000,-
19. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 47.000.000,-
20. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 82.000.000,-
21. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 75.200.000,-
22. Penyelenggaraan Pameran Investasi
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 36.642.000,-
23. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 153.000.000,-

24. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 37.540.000,-
25. Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 107.250.000,-
26. Pengaduan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,-

(Sumber : berdasarkan DPA DPMPTSP setelah perubahan Tahun Anggaran 2019)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditetapkan dalam PerBup Nomor 28 tahun 2017, dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi masih terdapat beberapa permasalahan dalam melaksanakan tugas, antara lain :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal :

- Masih kurangnya promosi investasi

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi :

- Pelaporan yang belum disampaikan oleh perusahaan yang berinvestasi di Lebong (PMA/PMDN) Tahun 2016.
- Belum adanya data wajib izin, data perusahaan (data perusahaan belum sinkron antara data provinsi dengan kabupaten) perwilayah kecamatan
- Masa berlaku izin yang telah habis

- Staf pengendalian yang belum mengikuti pelatihan/diklat teknis pengendalian terkait menghadapi investor/penanam modal/wajib izin.
- Sarana pekerjaan yang belum memenuhi kriteria standar untuk melakukan pengendalian dan pengawasan.
- Belum adanya informasi mengenai aturan penanaman modal kepada masyarakat.

3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

- Masih kurangnya tenaga atau SDM yang mampu untuk menjalankan aplikasi/operator tentang perizinan online.
- Belum adanya pelayanan perizinan secara online.
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk proses perizinan dari front office sampai ke back office.

4. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

- Adanya pengaduan dari masyarakat masalah gangguan lingkungan.
- Kurangnya pemahaman dalam membuat indeks kepuasan masyarakat (IKM)



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada sembilan agenda utama pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu :

- Agenda I** : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Agenda II** : Membuat Pemerintah Selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, Dan terpercaya.
- Agenda III** : Membangun Indonesia Dari pinggiran dengan memperkuat daerah-Daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Agenda IV** : Memperkuat Kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi , Bermartabat, dan terpercaya.
- Agenda V** : Meningkatkan Kualitas hidup manusia Indonesia.
- Agenda VI** : Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Sehingga bangsa Indonesia Bisa maju dan bangkit bersama bangsa-Bangsa Asia lainnya.
- Agenda VII** : Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - Sektor strategis ekonomi domestik.

Agenda VIII : Melakukan Revolusi karakter bangsa.

Agenda IX Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJMN tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebong yaitu Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Lebong yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**. Adapun makna yang terkandung dalam setiap frase dijelaskan sebagai berikut :

- **Maju** ; Peningkatan Aspek Daya Saing Daerah.
- **Mandiri**; Kondisi Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (self - help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- **Sejahtera**; dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lebong maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun misi dari RPJMD Kabupaten Lebong tahun 2016 – 2021 :

Misi I

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi II

Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik yang baik.

Misi III

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK.

Misi IV

Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berdaya saing serta berwawasan Lingkungan

Misi V

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dibahas di atas adalah :

Strategi :

1. Meningkatkan efisiensi pelayanan akan dilakukan penyempurnaan organisasi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan IT untuk keperluan pengembangan dan *online service*.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, optimalisasi pengelolaan investasi serta memberikan insentif investasi berupa pemberian kemudahan persyaratan.
3. Menerapkan investasi berwawasan lingkungan melalui pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang dituangkan dalam izin investasi, IMB dan izin lingkungan serta melakukan monitoring/pengawasan dengan meningkatkan keterlibatan instansi terkait terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan dan pelaksanaan penanaman modal.

4. Menyelenggarakan sosialisasi dan promosi potensi investasi dan produk serta penyediaan informasi realisasi dan peluang investasi.

Arah Kebijakan :

1. Secara kontinu melaksanakan upaya peningkatan efisiensi dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan.
2. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan secara online dan penyediaan layanan informasi investasi.
3. Perbaiki kualitas pelayanan public agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan promosi investasi yang berdomisili lokal, regional, nasional dan internasional.
5. Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan.
6. Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kerangka terwujudnya prioritas pembangunan tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai visi tahun 2017-2021, yaitu : **“Mewujudkan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan Serta Pelayanan Investasi Penanaman Modal”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban 3 (Tiga) Misi, yaitu :

MISI PERTAMA

Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.

MISI KEDUA

Meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas melalui pelayanan perizinan online.

MISI KETIGA

Menciptakan keluhan menjadi kepuasan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

3.2.1 Tujuan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2021 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.

Adapun tujuan Rencana Kerja adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021.

Dalam kurun waktu singkat, penjabaran/implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut yaitu :

1. Tercapainya peningkatan Nilai Investasi (PMDN/PMA) serta Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Terselenggaranya pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

3. Terwujudnya pencapaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPMPTSP secara berkala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2.2 Sasaran Rencana Kerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kabupaten Lebong.
- b. Meningkatnya pelayanan perizinan/non perizinan.
- c. Meningkatnya mutu pelayanan perizinan terpadu.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong sesuai dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal dan PTSP mempunyai 6 program sebagaimana termuat dalam PJMD, yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- g. Penyediaan alat tulis kantor.
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- j. Penyediaan makanan dan minuman.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- l. Pengadaan kendaran dinas/operasional.
- m. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- n. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- o. Pengadaan meubeleur.
- p. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- q. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- r. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan:

- a. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi.
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
- d. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota.
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota.

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal.

3.3.3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

3.3.4 Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Sub Kegiatan:

- a. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

3.3.5 Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
- b. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- c. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi / insentif daerah.

3.3.6 Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal.
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota.

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pengajuan kebutuhan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran tahun 2021.

Penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk merespon perkembangan dan penerapan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam tatanan pemerintah Kabupaten Lebong.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dipergunakan seperlunya.

**PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006**



TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LEBONG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD I, APBD II, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran internal SKPD		-	2.033.000.000				2.033.000.000
2 12 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Suka Marga	12 Bulan	150.000.000	DAU		12 Bulan	150.000.000
2 12 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Suka Marga	12 Bulan	110.000.000	DAU		12 Bulan	110.000.000
2 12 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perawatan Mobil, Motor, Pengurusan Surat Menyurat Kendaraan	Suka Marga	12 Bulan	250.000.000	DAU		12 Bulan	250.000.000
2 12 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Teriaksananya pengelolaan keuangan	Suka Marga	12 Bulan	358.000.000	DAU		12 Bulan	358.000.000
2 12 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Suka Marga	12 Bulan	430.000.000	DAU		12 Bulan	430.000.000
2 12 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kantor	Suka Marga	12 Bulan	40.000.000	DAU		12 Bulan	40.000.000
2 12 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Suka Marga	12 Bulan	150.000.000	DAU		12 Bulan	150.000.000
2 12 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penggandaan Dokumen DPMPSTP, Cetak kalender dll	Suka Marga	12 Bulan	60.000.000	DAU		12 Bulan	60.000.000
2 12 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Suka Marga	12 Bulan	35.000.000	DAU		12 Bulan	35.000.000
2 12 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum harian, rapat, tamu	Suka Marga	12 Bulan	100.000.000	DAU		12 Bulan	100.000.000
2 12 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Teriaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	12 Bulan	350.000.000	DAU		12 Bulan	350.000.000
2 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang Tugas Aparatur		-	2.630.000.000				2.630.000.000
2 12 02 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor, Pagar Kantor dan Infrastruktur DPMPSTP lainnya	Suka Marga	3 Paket	1.800.000.000	DAU		3 Paket	1.800.000.000
2 12 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Suka Marga	-	-	DAU		-	-
2 12 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	DAU		-	-
2 12 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		1 Paket	150.000.000	DAU		1 Paket	150.000.000
2 12 02 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Suka Marga	1 Paket	200.000.000	DAU		1 Paket	200.000.000

2	12	02	12	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya	Tersedianya komputer dan jaringan internet	Suka Marga	1 Paket	150.000.000	×	DAU		1 Paket	150.000.000	✓
2	12	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Suka Marga	1 Paket	150.000.000	✓	DAU		1 Paket	150.000.000	✓
2	12	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Suka Marga	1 Paket	100.000.000	✓	DAU		1 Paket	100.000.000	✓
2	12	02	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Suka Marga	-	-	×	DAU		-	-	×
2	12	02	47	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Gedung Kantor	Terpeliharanya Taman Gedung Kantor		1 Paket	80.000.000	×			1 Paket	80.000.000	×
2	12	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkannya disiplin aparatur			150.000.000					150.000.000	
2	12	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin /Kartu Absensi	Suka Marga	-	-	✓			-	-	✓
2	12	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian PDH dan pakaian putih	Suka Marga	-	-	✓			-	-	✓
2	12	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu	Suka Marga	Batik/pakaian khusus dan olahraga dan sepatu (120)	150.000.000	✓	DAU		Batik/pakaian khusus dan olahraga dan sepatu (120)	150.000.000	✓
2	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkannya Kemampuan SDM Aparat Pemerintah			200.000.000					200.000.000	
2	12	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya Aparatur di DPMTSP yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan maupun penyelenggaraan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Suka Marga	22 ASN	200.000.000	✓	DAU		22 ASN	200.000.000	✓
2	12	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			191.000.000					191.000.000	
2	12	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen Teppra Triwulan	Suka Marga	4 Dokumen	49.000.000	✓	DAU		4 Dokumen	49.000.000	✓
2	12	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan	Suka Marga	1 Dokumen	25.000.000	✓	DAU		1 Dokumen	25.000.000	✓
2	12	06	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen pelaporan monitoring	Suka Marga	4 Dokumen	49.000.000	✓	DAU		4 Dokumen	49.000.000	✓
2	12	06	07	Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	Tersedianya Renja, Lakip dan Renstra SKPD	Suka Marga	2 Dokumen	40.000.000	✓	DAU		2 Dokumen	40.000.000	✓
2	12	06	13	Penyusunan Pelaporan Aset SKPD	Tersedianya Laporan Aset OPD	Suka Marga	1 Dokumen	28.000.000	✓	DAU		1 Dokumen	28.000.000	✓

2	12	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya tertib SOP					55.000.000									55.000.000
2	12	26	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya SOP DPMPPTSP	Suka Marga	1 Dokumen			55.000.000									55.000.000
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal OPD					35.000.000									35.000.000
			Monitoring Implementasi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Implementasi SPIP OPD	Suka Marga	1 Dokumen			35.000.000									35.000.000
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Investor per tahun					1.320.000.000									1.320.000.000
1	16	15	02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya informasi potensi peluang investasi unggulan	Kab. Lebong	1 Dokumen		DAU	150.000.000									150.000.000
1	16	15	05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan adanya regulasi Penanaman Modal	Kab. Lebong	1 Dokumen Regulasi Penanaman Modal		DAU	180.000.000									180.000.000
1	16	15	06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Kab. Lebong	4 Dokumen			180.000.000									180.000.000
1	16	15	07 Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Penanaman Modal	Kab. Lebong	4 Dokumen			200.000.000									200.000.000
1	16	15	08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tersusunnya Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Data Wajib Izin	Kab. Lebong	2 Dokumen		DAU	260.000.000									260.000.000
1	16	15	10 Penyelenggaraan Pameran Investasi	- Terlaksananya pameran didalam negeri	Luar Daerah	6 kali		DAU	350.000.000									350.000.000

1 16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Capaian Realisasi Investasi			540.000.000			540.000.000			540.000.000
1 16	16	02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Kab. Lebong	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Masalah, jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi teknis terkait penyelesaian masalah, jumlah rumusan permasalahan	5 Kali (Fasilitasi dan Mediasi), 1 Dokumen Rumusan Permasalahan	260.000.000		260.000.000			260.000.000
1 16	16	04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Lebong	- Tersedianya database dan informasi penanaman modal yang terintegrasi dalam sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik	Pengembangan 1 paket GIS data center dan DRC, System Aplikasi Data Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	280.000.000		280.000.000			280.000.000
1 15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Persentase Izin Yang diterbitkan untuk UKM		100.000.000		100.000.000			100.000.000
1 15	15	03	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Kab. Lebong	Terlaksananya Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	395	100.000.000		100.000.000			100.000.000
1 20	20	24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan dan Pemerksaan Terhadap Kasus Pengaduan Masyarakat		170.000.000		170.000.000			170.000.000
			Penanganan dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	Kab. Lebong	Terselenggaranya pelayanan guna penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan	2 Dokumen	170.000.000		170.000.000			170.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase Standar Pelayanan Publik Yang diimplementasikan		170.000.000		170.000.000			170.000.000
			Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Lebong	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha	2 Dokumen	170.000.000		170.000.000			170.000.000
			Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan		Persentase Izin Yang Diterbitkan		540.000.000		540.000.000			540.000.000
			Survey dan Pemeriksaan Prasyarat Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Lebong	Terselenggaranya Survey Tim Teknis Perizinan	120	200.000.000		200.000.000			200.000.000

	Pengembangan Sistem Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan / Nonperizinan secara elektronik	Kab. Lebong	700	150.000.000		700	150.000.000
	Terlaksananya pengurusan izin baru dan perpanjangan izin secara elektronik						
	Pelayanan Perizinan Secara Mobile	Kab. Lebong	4	40.000.000	DAU	4	40.000.000
	Terlaksananya pelayanan perizinan secara mobile						
	Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Lebong	200 Peserta	150.000.000	DAU	200 Peserta	150.000.000
	Terlaksananya sosialisasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal						
	JUMLAH			8.134.000.000			8.134.000.000

Suka Marga, 2020
KEPALA,

BAMBANG ASB, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

**KONVERSI PEMETAAN
PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

KONVERSI PERMENDAGRI 90 Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Output	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	13	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	
				29	
				30	
				31	
				32	
				33	
				34	
				35	
				36	
				37	
				38	
				39	
				40	
				41	
				42	
				43	
				44	
				45	
				46	
				47	
				48	
				49	
				50	
				51	
				52	
				53	
				54	
				55	
				56	
				57	
				58	
				59	
				60	
				61	
				62	
				63	
				64	
				65	
				66	
				67	
				68	
				69	
				70	
				71	
				72	
				73	
				74	
				75	
				76	
				77	
				78	
				79	
				80	
				81	
				82	
				83	
				84	
				85	
				86	
				87	
				88	
				89	
				90	

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pengadaan dokumen DPMPTSP, cetak kalender, dll	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pengadaan dokumen DPMPTSP, cetak kalender, dll	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian, rapat, tamu	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian, rapat, tamu	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor, Pagar Kantor dan Infrastruktur DPMPPTSP lainnya										Tidak Ada di DPMPPTSP dan menjadi Kewenangan Dinas PUPR
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.2.4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pengadaan Meubeleurnya	Tersedianya Meubeleurnya kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.2.5	Pengadaan Meubeleurnya	Tersedianya Meubeleurnya kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Tersedianya komputer dan jaringan internet	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.2.4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur	x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	x.xx.01.2.03.3.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	x.xx.01.2.03.3 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Gedung Kantor	Terpeliharanya Taman Gedung Kantor				Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	x.xx.01.2.04.0 1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan ya	Tersedianya Pakaian PDH dan pakain Putih	x.xx.01.2.04.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan ya	Tersedianya Pakaian PDH dan pakain Putih	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur	x.xx.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	x.xx.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya aparatur DPMPPTSP yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan maupun penyelenggaraan fungsi PMPTSP	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah	x.xx.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terfasilitasinya peningkatan kemampuan SDM aparat pemerintah	x.xx.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya aparatur DPMPPTSP yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan maupun penyelenggaraan fungsi PMPTSP	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen Tepra Triwulan	x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelaporan keuangan	x.xx.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen Tepra Triwulan	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

		Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelaporan keuangan	x.xx.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya dokumen pelaporan monitoring	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	x.xx.01.2.01.05	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan OPD	x.xx.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan monitoring	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD		Tersedianya Renja, Lakip dan Renstra SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	x.xx.01.2.01	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan OPD	x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja DPMPTSP	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
	Penyusunan Pelaporan Aset SKPD		Tersedianya Laporan Aset OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelaporan keuangan	x.xx.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP DPMPTSP	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
												Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya SOP DPMPPTSP															Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring Implementasi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya implementasi SPIP OPD															Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya informasi potensi peluang investasi unggulan	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kabupaten/kota	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019					
				2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kabupaten/kota	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019					

		Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha secara elektronik dan terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019	Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
--	--	---	---	---------	-----------------------------------	--	--------------	---	---	-----------------	---	--	--	--

																		Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
																		Dokumen realisasi investasi PMDN dan PMA Kabupaten Lebong
																		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
																		2.18.05..2.01.01
																		Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA kabupaten Lebong
																		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
																		2.18.05.2.01
																		Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
																		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
																		2.18.05
																		Perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA Kabupaten Lebong
																		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
																		2.18.05
																		Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
																		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
																		2.18.05.2.01
																		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
																		Terlaksananya pengawasaan pada perusahaan penanaman modal
																		2.18.05..2.01.03
																		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
																		Dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal
																		Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

9	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Terlaksananya Fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan yang menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya a pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	2.18.05..2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan yang menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Data informasi potensi investasi daerah	2.18.06	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya a pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten	Peningkatan realisasi investasi daerah	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Data Realisasi investasi per sektor dan informasi penanaman modal	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

10	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</p>	<p>Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah</p>	<p>Terlaksananya jumlah UMKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin</p>		<p>Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019</p>
11	<p>Program Mengintensifika n Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Penanganan dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Terselenggarany a pelayanan guna penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan</p>		<p>Ada di Renstra, Tidak Ada di Permendagri 90 Tahun 2019</p>

12	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan usaha	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dan terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan usaha	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019
13	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan secara Elektronik	Terselenggaranya pengurusan izin baru dan perpanjangan izin secara elektronik	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dan terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpenuhinya komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku	Ada di Renstra, Ada di Permendagri 90 Tahun 2019

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

BAMBANG ASB, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

PEMUTAKHIRAN

KONVERSI PEMETAAN

PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
(PEMUTAKHIRAN SIPD PER SEPTEMBER 2020)**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG**

Kode	Program/kegiatan	Kode	Pemutakhiran	Keluaran	Lokasi	Anggaran
x.xx.01	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
x.xx.01.2.01	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja DPMPPTSP	Suka Marga	30.000.000
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Suka Marga	2.339.696.945
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP DPMPPTSP	Suka Marga	27.500.000
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Suka Marga	11.550.000

x.xx.01.2.03	Administrasi Umum	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
x.xx.01.2.03.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat : Materai,dll	Suka Marga	7.482.000
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan : Koran, Iklan	Suka Marga	40.755.000
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
x.xx.01.2.03.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Belanja air, listrik)	Suka Marga	60.620.000
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja Internet		64.380.000
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
x.xx.01.2.03.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya perawatan mobil, motor pengurusan surat menyurat kendaraan (Belanja jasa servis, penggantian suku cadang,bbm,pajak kendaraan)	Suka Marga	194.000.000

		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.03.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan (Honor PA,PPKEU,Pembantu PPK,Bendahara, pengurus barang,bendahara penerimaan,pejabat pengadaan barang)	Suka Marga	59.280.000
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
x.xx.01.2.03.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Penyedia jasa keamanan dan kebersihan kantor), THLT 27 orang	Suka Marga	644.200.000
x.xx.01.2.03.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor (Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin)	Suka Marga	12.000.000
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Manmin	Suka Marga	165.000.000
x.xx.01.2.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan dan cetak dokumen DPMPSTP (Belanja Cetak, Foto copy, penggandaan,Spanduk)	Suka Marga	46.476.700
x.xx.01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Belanja alat listrik)	Suka Marga	30.000.000
x.xx.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Digabung ke logistik		
x.xx.01.2.03.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah, dalam daerah (DL, DD)	Suka Marga	253.000.000

x.xx.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : Thermometer Infrared, Wastafel, Partisi (Perisai Plexiglass untuk front office, ruang pelayanan tim teknis), hordeng dll... Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Drone, perlengkapan internet, AC, Kamera/handycame, dll)	Suka Marga	179.500.000
x.xx.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Digabung ke Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
x.xx.01.2.03.25	Pengadaan Meubeleur	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeleur ruang Tim Teknis (Kursi Pejabat, Lemari Arsip, Kursi Tunggu Pelayanan, Kursi Rapat)	Suka Marga	109.120.000
x.xx.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
x.xx.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	2.18.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1 Stel (Belanja Pakaian Khusus pelayanan untuk 23 ASN dan 27 TKK)	Suka Marga	62.000.000
x.xx.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	<i>Pagu Dialihkan Ke Rakor</i>		
x.xx.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan	Suka Marga	90.000.000
02.18.03	2. Program Promosi Penanaman Modal	02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	02.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	02.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal, Strategi dlm bentuk : Pembuatan buku data potensi (melibatkan pihak akademis/UNIB dll)	Suka Marga	50.000.000

2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	02.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal, (Promosi melalui media masa/elektronik dan mengikuti pameran investasi)	Suka Marga	65.000.000
2.18.04	3. Program Pelayanan Penanaman Modal	02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal			
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	02.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	02.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan : Dokumen Izin (keg. Meliputi honorarium Tim Teknis Perizinan per semester, Cetak al. Stiker lunas IMB, manmin rapat dll)	Suka Marga	62.280.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	02.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpenuhinya komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku, Dokumen kelengkapan komitmen pemenuhan persyaratan perizinan (Hasil Pemantauan langsung ke lokasi Badan Usaha, keg. Meliputi DD ke lokasi badan usaha, dll)	Suka Marga	30.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	02.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan usaha, 2 Dokumen (2 Laporan Semester SKM), Objek Survey adalah Pelaku usaha/pemohon izin)	Suka Marga	70.000.000
2.18.05	4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	02.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan penanaman modal, Dokumen realisasi investasi PMDN dan PMA Kabupaten Lebong (LKPM)	Suka Marga	45.000.000

2.18.05..2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	02.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Fasilitasi / Mediasi Penanaman Modal, Dokumen rumusan permasalahan, frekuensi fasilitasi dan mediasi penyelesaian permasalahan serta frekuensi koordinasi dan konsultasi teknis terkait penyelesaian permasalahan	Suka Marga	167.800.000	
2.18.06	5. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	2.18.06	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal				
2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten	2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota				
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Data Realisasi investasi per sektor dan informasi penanaman modal (Data keseluruhan perizinan + Data Investasi (PMDN/PMA)	Suka Marga	20.000.000	
TOTAL						4.936.640.645	
						Gaji	2.339.696.945
						BL	2.596.943.700

Suka Marga, 15 September 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong

BAMBANG ASB, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002